

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

2020



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

2020

<https://jateng.bps.go.id>



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 2020

ISSN : 2745-6242
No. Publikasi : 33000.2151
Katalog : 4601008.33
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vi + 35 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2020 menyajikan analisis deskriptif hasil penghitungan IDI 2020 untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Publikasi dalam bentuk booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variabel, dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta uraian ringkas. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2021

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Plt. Kepala



Sentot Bangun Widionono, MA

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Infografis	1
I. Demokrasi	3
II. Apa itu IDI?	5
III. Mengapa IDI Diperlukan?	7
IV. Apa Manfaat IDI?	9
V. Metodologi Penyusunan IDI	11
VI. Tren Demokrasi di Jawa Tengah 2020	17
VII. Penutup	27
Lampiran	29

IDI Jawa Tengah 2020
sebesar

75,43
(sedang)



aspek
demokrasi



KEBEBASAN SIPIL

73,68

 4,78 poin



HAK-HAK POLITIK

75,46

 7,55 poin



LEMBAGA DEMOKRASI

77,60

 12,90 poin

I. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekkan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi *deficit* sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries, partly free*.

II. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya, baik di tingkat daerah maupun pusat, bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenkopolhukam, didukung oleh Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Sejak IDI 2016, UNDP sudah tidak terlibat dalam penyusunan IDI.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI, antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi. Dalam hal ini, IDI dapat diumpamakan sebagai sketsa yang memberikan gambaran yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga mengalami distorsi.
3. IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat. Pada konteks inilah, variabel dan indikator IDI tidak saja diarahkan pada upaya “merekam” kinerja kelembagaan demokrasi (*structure*), tetapi juga kinerja perilaku dari para pelaku demokrasi (*agencies*) yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun Negara.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan menjadi rujukan, baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. Terkait dengan formulasi kebijakan dan pembangunan politik, IDI memang harus dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit.

III. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lebih dua dasawarsa, era demokrasi berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi? Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor pembentuknya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/-heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia. Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik. Sehingga langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang

sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

<https://jateng.bps.go.id>

IV. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat, utamanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/-demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.
3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak

hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

<https://jateng.bps.go.id/>

V. Metodologi Penyusunan IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan pengumpulan data IDI mencakup tiga tahapan, yaitu:

1. Koding surat kabar dan koding dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data *kuantitatif* (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 Aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI 2020.

Penggunaan dokumen sebagai sumber data IDI tidak menuntut banyak penjelasan. Karena pada dasarnya, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan media, khususnya surat kabar, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi mungkin tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus.

Surat kabarliah yang merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Bukan berarti surat kabar tidak memiliki kelemahan. Keterbatasan surat kabar seperti kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, disamping keterbatasan tersebut dan dengan asumsi surat kabar di Indonesia adalah surat kabar

yang bebas dan merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik. terlebih dalam hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerah.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. Sementara untuk *review* dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

Focus Group Discussion (FGD) dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1). Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjanging data *kualitatif* berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam

pengumpulan data IDI adalah, pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data *kualitatif*) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan koding surat kabar dan koding dokumen dan level 2 merupakan

skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil koding surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada koding Koran atau koding dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan skoring data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen dibanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI diperoleh melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat

terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Sejak tahun 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” **sebelumnya** “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” **sebelumnya** “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.



IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu **Kebebasan Sipil** (*Civil Liberty*), **Hak-Hak Politik** (*Political Rights*), dan **Lembaga Demokrasi** (*Institution of Democracy*)

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data



Focus Group Discussion

Review Surat Kabar

Review Dokumen

Wawancara Mendalam

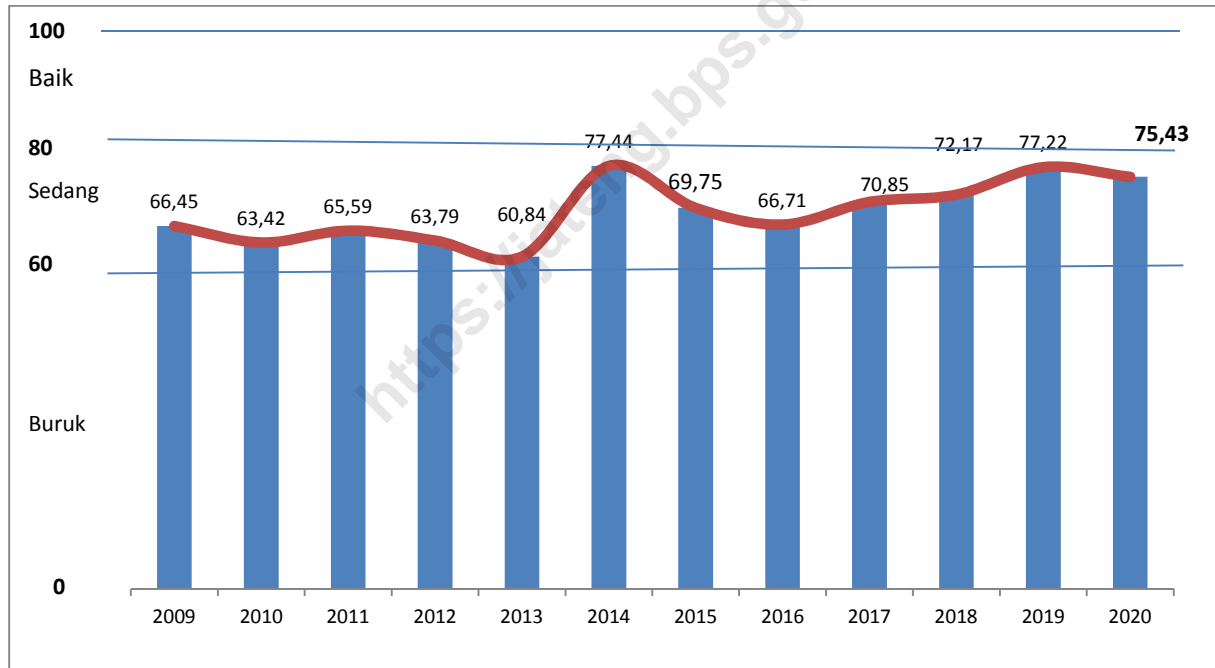
VI. Trend Demokrasi di Jawa Tengah 2020

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2020 mencapai **75,43** dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2019 yang capaiannya sebesar **77,22**. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,45. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 77,44, namun kembali turun hingga 2016, kemudian membaik sejak 2017, yaitu menjadi 70,85, terus naik menjadi 77,22 pada tahun 2019 dan tahun 2020 sedikit turun yaitu pada angka 75,43.

Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di Jawa Tengah. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun secara cermat berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di suatu wilayah.

Grafik 2
Perkembangan IDI di Jawa Tengah, 2009 – 2020



1. Indeks Aspek IDI

Angka IDI 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 73,68; aspek Hak-hak Politik yang bernilai 75,46; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 77,60.

Dari tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020 yang memengaruhi penurunan angka IDI adalah aspek Kebebasan Sipil, yaitu turun sebesar 4,75 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2019, aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan cukup besar, yaitu sekitar 12,90 poin. Sedangkan aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan sebesar 7,55 poin dibandingkan perolehan pada tahun 2019.

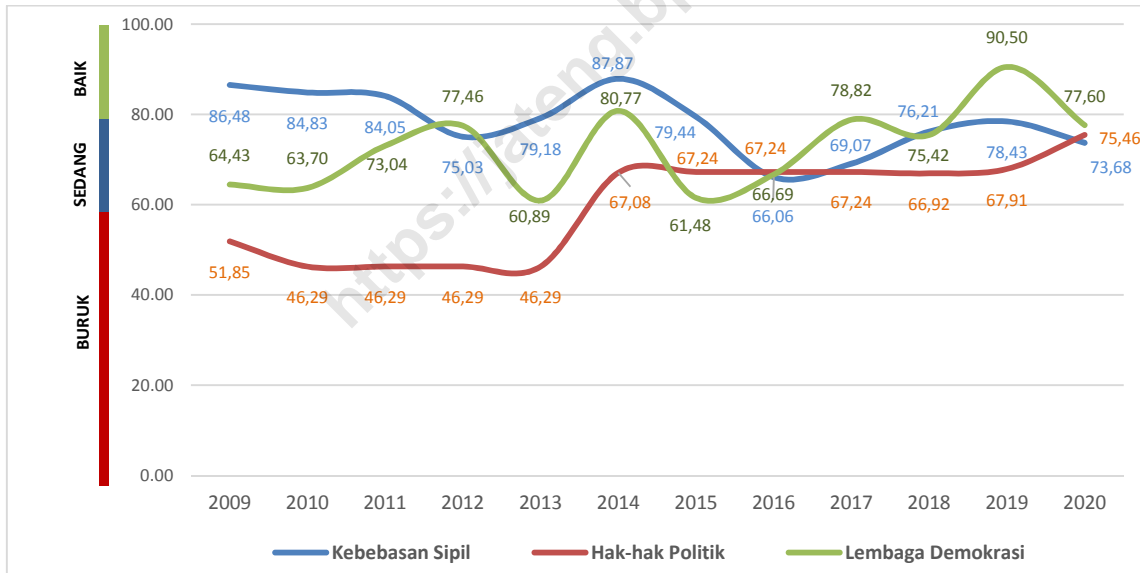
Sejak tahun 2014, tidak lagi ditemukan kondisi indeks aspek yang berkategori “buruk” sampai dengan tahun 2020. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012 hingga 2020 aspek ini menjadi kategori “sedang”, kecuali pada tahun 2014 yang kembali mencatat kategori baik.

Sementara itu, pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 tercatat stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, ketika aspek ini menembus kategori “sedang”, dan bertahan sampai dengan 2020.

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori tercatat stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2018 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, kecuali pada tahun 2014 yang sempat mencapai kategori “baik”. Dan pada tahun 2019, Aspek Lembaga Demokrasi mengulang

kembali capaian kategori “baik” seperti pada tahun 2014. Akan tetapi tahun 2020 aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sehingga kembali pada kategori “sedang”.

Grafik 3
Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah, 2009 – 2020



2. Indeks Variabel IDI

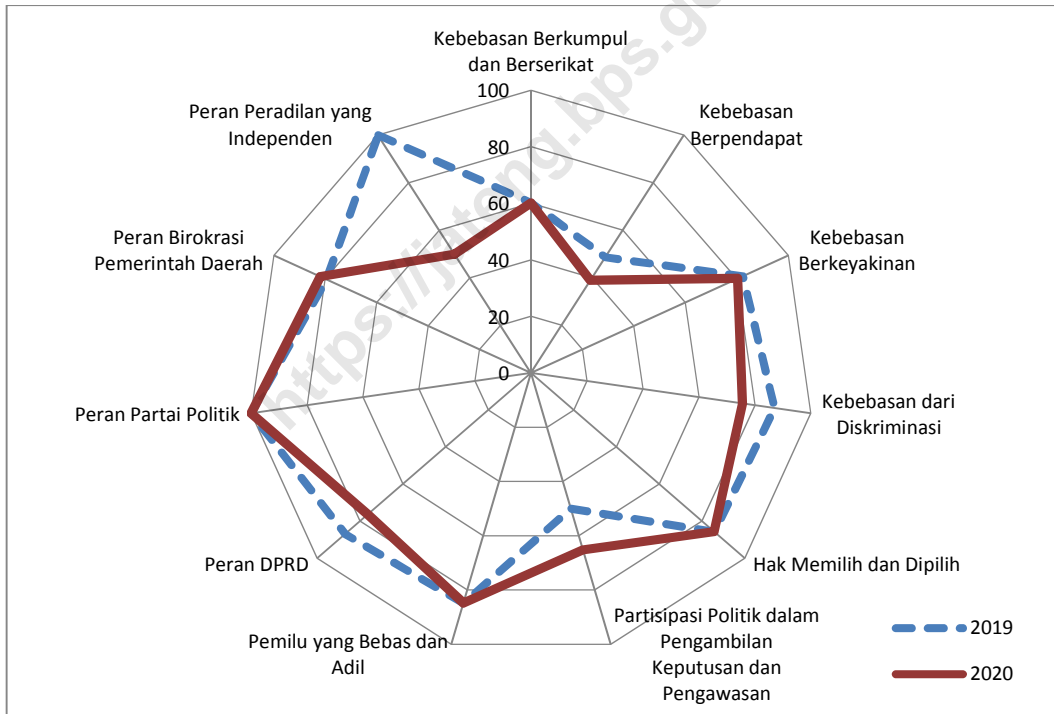
Dari 11 variabel komponen penghitungan angka IDI, pada Tahun 2020 tercatat 6 (enam) variabel yang mengalami penurunan indeks, 2 (dua) variabel mengalami peningkatan dan 3 (tiga) variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Dari 6 (enam) variabel yang mengalami penurunan berturut-turut dari yang terbesar adalah variabel Peradilan yang Independen menurun cukup tajam, yakni sebesar 50,00 poin, dari nilai 100,00 pada 2019 menjadi 50,00 pada 2020, variabel Kebebasan dari Diskriminasi juga mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu 11,43 poin. Penurunan nilai indeks variabel ini menyebabkan capaian indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi bergeser dari kategori “baik” pada tahun 2019 menjadi kategori “sedang” pada tahun 2020, yaitu dari 86,87 pada 2019 menjadi 75,54 pada 2020. Demikian pula dengan variabel Peran DPRD dengan penurunan sebesar 10,60 poin, dari 87,01 poin (2019) menjadi 76,41 poin (2020).

Variabel lain yang mengalami penurunan yakni variabel Kebebasan Berpendapat yang turun 9,71 poin dari 48,59 poin (2019) menjadi 38,88 poin (2020) dan tetap pada kategori “buruk”.

Variabel Kebebasan berkeyakinan dengan nilai indeks yang turun 1,92 poin, dari 82,32 (2019) menjadi 80,40 (2020) dan variabel Hak Memilih dan Dipilih yang turun sebesar 0,12 poin, dari 85,82 (2019) menjadi 85,70 (2020). Meskipun keduanya menurun, namun masih tetap dalam kategori “baik”.

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah meningkat secara bermakna karena variable ini mengalami kenaikan sebesar 2,40 poin, dari 79,56 pada 2019 menjadi 81,96 pada 2020. Di sisi lain, peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, yang semula berada di kategori “sedang” pada tahun 2019 dan memasuki kategori “baik” pada tahun 2020. Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan juga mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 15,22 poin, yaitu dari 50,00 (2019) menjadi 65,22 (2020), yang juga mengubah posisi variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan menjadi kategori “sedang” pada 2020 dari sebelumnya tercatat sebagai kategori “buruk” (2019).

Grafik 3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah, 2019 - 2020



3. Skor Indikator IDI

Pada tahun 2020 dari 28 indikator IDI, tercatat 15 indikator yang memiliki skor dengan kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu:

- a. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya,
- b. Indikator 6, Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya,
- c. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- d. Indikator 9, Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- e. Indikator 11, Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,
- f. Indikator 12, Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih,
- g. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),

- h. Indikator 14, Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*),
- i. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- j. Indikator 19, Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara,
- k. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD,
- l. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu,
- m. Indikator 24, Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol tingkat provinsi,
- n. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- o. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan.

Namun demikian, pada tahun 2020 masih ditemukan 8 (delapan) indikator demokrasi dengan skor berkategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja IDI yang lebih baik. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 2, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,

- b. Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- d. Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- e. Indikator 10, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- f. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- g. Indikator 21, Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan
- h. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

VII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari Pokja IDI dalam menyosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat.

LAMPIRAN

<https://jateng.bps.go.id>

Tabel 1. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Kebebasan Sipil		66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	6,25	60,16	60,16
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	50,00	50,00	43,75	43,75
II	Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	61,82	48,59	38,88
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,83	54,17	54,17	58,33	41,67
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00	0,00	25,00
III	Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	81,54	82,32	80,40
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	86,96	86,96	86,96	82,61	86,96
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	43,75	50,00	50,00	100,00	87,50
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	0,00	80,00	80,00	70,00	50,00

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Kebebasan Sipil		66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
IV Kebebasan dari Diskriminasi		80,03	63,53	75,25	86,97	75,54
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	87,50	100,00	53,13	81,25
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	50,00	0,00	25,00	100,00	41,67

Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2012 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Hak-Hak Politik		67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
V	Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan	92,95	92,95	92,95	87,18	87,18
12	fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00	60,00	97,32	97,32
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	89,65	89,65	89,65	89,60	89,60
14	<i>Voters turnout</i>	73,24	73,24	73,24	80,04	80,04
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	80,00	80,00	73,33	63,90	62,67
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2012 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Lembaga Demokrasi		66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	100,00	84,84	84,84
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	100,00	77,27	77,27
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	73,42	73,42	100,00	92,41	92,41
VIII	Peran DPRD	50,50	79,74	100,00	87,10	76,41
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	56,72	88,18	100,00	95,50	98,90
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	80,00	66,67	100,00	82,36	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	60,71	100,00	60,71	60,71
IX	Peran Partai Politik	74,29	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00
24	% perempuan dalam kepengurusan partai politik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Lembaga Demokrasi		66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	27,43	83,16	54,30	79,56	81,96
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	10,53	63,16	0,00	55,26	60,53
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00
XI Peran Peradilan Yang Independen		100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

